

REFLEKSI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KREDIT USAHA MIKRO BAGI KOMUNITAS MISKIN PERKOTAAN

Getar Hati

Universitas Indonesia
getarhati.lazuardi@gmail.com

Received: 18 December 2019 | Reviewed: 29 December 2019 | Accepted: 20 January 2020

ABSTRAK

Program pemberdayaan ekonomi untuk menanggulangi masalah kemiskinan perkotaan, salah satu program yang diupayakan adalah program Koperasi Jasa Keuangan-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK-PEMK) dan dikelola secara khusus oleh Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) serta dikoordinasikan di tingkat kelurahan. Selama pelaksanaan program lebih dari 60% wilayah teridentifikasi tidak berhasil. Untuk itu, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan sebagai refleksi implementasi program. Artikel ini didasarkan pada hasil penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif dan berfokus pada salah satu kelurahan (X) di DKI Jakarta sebagai salah satu wilayah program yang menempati ranking tertinggi kategori tidak berhasil, dengan mengacu pada indikator kelancaran pengembalian dana bergulir. Penelitian ini melibatkan informan antara lain pengelola dan penerima program KJK PEMK (X) dengan pengumpulan melalui data primer melalui wawancara mendalam dan observasi serta data sekunder berupa laporan program. Hasil temuan menunjukkan bahwa ketidakberhasilan program disebabkan faktor manusia dan sosial, faktor non manusia dan sosial, serta faktor penerapan kebijakan dan program yang masih yang mendukung perilaku negatif penerima program. Untuk itu, implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi seharusnya perlu menekankan pada keseluruhan aspek, bukan sekedar fokus pada peningkatan modal ekonominya.

Kata Kunci: Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan, Kredit Mikro

ABSTRACT

Economic empowerment program towards urban poverty alleviation, with one of program was implemented through Koperasi Jasa Keuangan-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK-PEMK) of which managed by Revolving Fund Management Unit of DKI Jakarta and coordinated in urban village level. During program implementation, it has been evaluated that more than 60% areas indicated as unsuccessful program. This article has purpose to describe factors that cause the ineffectiveness of program as a reflection to the micro credit program implementation. This article is written based on the results of conducted through qualitative methods and focused on one of the Urban Village (X) in DKI Jakarta as an one of highest rank which classified as unsuccessful group. This research involved the managers and program recipients of KJK-PEMK (X) for primary data through in-depth interviews and observation and secondary data collection through program report documents. It results that reflection the failure of program raised by the presence of the human and social factors, non-human and social factors, and policy and programs implementation factors which supports the negative behaviour of the program beneficiaries. It indicates that the implementation of poverty alleviation program through economic empowerment should need to emphasis on improving the human and social capitals, not only strengthen the economic capitals

Keywords: Poverty Alleviation, Community Empowerment, Micro Credit

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan di perkotaan masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah, terutama di kota besar seperti DKI Jakarta. DKI Jakarta dipilih menjadi fokus area pembahasan dengan mempertimbangkan bahwa wilayah ini merupakan barometer utama terkait kebijakan dan program penanggulangan komunitas miskin perkotaan dengan karakteristik komunitas yang beragam. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian intervensi kesejahteraan sosial di seting komunitas dan kebijakan. Pada tahun 2001 Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi yang menyentuh masyarakat di level komunitas kelurahan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

Program ini dirancang untuk menjadikan warga Jakarta lebih berdaya dan tidak bergantung pada pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara mendorong kemandirian masyarakat untuk menolong diri mereka sendiri (Sakethi, 2010). Program pemberdayaan masyarakat miskin ini memiliki 3 pilar yang disebut Tribina, yang mencakup Bina Ekonomi (bobot 60%), Bina Fisik Lingkungan (20%), dan Bina Sosial (20%). Bina Ekonomi memberikan dana pinjaman bergulir kepada warga yang membutuhkan, sementara Bina Fisik Lingkungan adalah dana hibah yang disalurkan kepada warga untuk memperbaiki sarana-prasarana di RW mereka, dengan gotong royong dan saling membantu. Sedangkan Bina

Sosial adalah juga hibah yang diberikan untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan ketrampilan bagi para warga yang belum mempunyai pekerjaan tetap atau mereka yang membutuhkan ketrampilan untuk meningkatkan perekonomian dan hidup mereka (Sakethi, 2010, p. 8).

Terkait dengan Bina Ekonomi yang memberikan mikro kredit bagi warga miskin, mulai tahun 2009 kemudian dikelola secara khusus oleh Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB PEMK) di bawah tanggung jawab Dinas Koperasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK). Warga Kelurahan membentuk dan mengelola koperasi mereka yaitu koperasi kelurahan, yang masing-masing memiliki empat pengurus dan empat pengelola. Koperasi yang mendapatkan dana bergulir adalah koperasi yang pengurusnya sudah mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Bentuk koperasi adalah koperasi simpan pinjam. Sebagai modal awal setiap koperasi kelurahan memperoleh kucuran dana secara merata sebesar Rp 540 juta. Modal tersebut adalah modal dasar dan koperasi yang berprestasi baik akan memperoleh dana pinjaman tambahan yang lebih besar lagi (dana tambahan selanjutnya disebut addendum) (Sakethi, 2010, p. 12).

Terkait dengan strategi pemberdayaan ekonomi komunitas miskin sebagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dikaji Wulan, Ati, & Widodo (2019) terkait implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di salah satu wilayah perkotaan di Jawa Timur menyebutkan bahwa fasilitasi bantuan permodalan berperan penting dalam menumbuhkan usaha produktif bagi anggota kelompok. Sedangkan Brook, Hillyer, & Bhuvaneshwari (2008) mengkaji komunitas miskin di wilayah India merupakan penerima manfaat program kredit mikro yang diinisiasi oleh organisasi non-pemerintah. Hasil kajiannya mendeskripsikan bahwa program dapat berhasil meningkatkan level kesejahteraan keluarganya sebesar 77% karena didorong oleh adanya upaya mobilisasi perubahan perilaku dan akses penerima manfaat sehingga mereka menjadi lebih mandiri.

Sementara Zuber (2014) mengkaji lebih makro terkait penanggulangan kemiskinan dalam perspektif pembangunan dinilai belum signifikan menysar tujuan, hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor mencakup adanya ketergantungan pembiayaan pembangunan dari negara lain, fokus perhatian penerapan program belum sepenuhnya berpusat pada kelompok miskin, dan belum adanya koordinasi dan sinergi antar pihak yang berkepentingan sehingga seringkali tumpang tindih. Dari kajian-kajian yang telah dihasilkan, menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan penelitian yang dikaitkan dengan konteks Indonesia bahwa program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi sebenarnya

menjadi potensi namun masih banyak mengalami kegagalan. Untuk itu, perlu dieksplorasi lebih mendalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan tersebut.

Jika dikaitkan dengan program KJK PEMK (X), akses bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya cukup besar. Berdasarkan laporan program, sampai pada tahun 2015 mencatat terdapat 182 KJK PEMK yang terbentuk di Jakarta dengan total dana yang sudah dicairkan mencapai Rp.277.888.800.000,00 (UPDB, April 2015). Dari keseluruhan wilayah KJK PEMK tersebut, baik wilayah yang diberi dana tambahan (addendum) dan tidak (non-addendum) sebagian besar dikategorikan sebagai KJK PEMK yang tidak berhasil dengan total tunggakan dana yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp.72.780.293.462,00 atau sebanyak 26% dari dana yang digulirkan.

Ketidakberhasilan KJK PEMK dilihat dari kelancaran dalam pengembalian dana yang pada akhirnya akan digulirkan kembali untuk pengembangan manfaat ke masyarakat yang lain. Terkait kategori wilayah KJK PEMK, dapat dilihat pada tabel 1.1. menunjukkan sebanyak 82% dari total dikategorikan sebagai KJK PEMK yang tidak lancar dan sisanya yaitu hanya sekitar 18% KJK PEMK dikategorikan lancar.

Tabel 1. Pemetaan KJK PEMK di DKI Jakarta (April 2015)

Wilayah	Addendum		Non-Addendum	
	Lancar	Tidak Lancar	Lancar	Tidak Lancar
Jakarta Selatan	9	32	3	4
Jakarta Utara	7	15	0	5
Jakarta Pusat	0	18	0	7
Jakarta Timur	10	29	0	10
Jakarta Barat	4	19	0	8
Kepulauan Seribu	-	-	-	2
Total	30	113	3	36

Sumber: UPDB DKI Jakarta (2015, April) telah diolah kembali

Secara faktual, salah satu area yang menjadi fokus permasalahan ini juga terjadi pada salah satu wilayah kelurahan (X) di Jakarta Timur yang masuk pada kategori program yang tidak berhasil karena mengalami tunggakan yang besar. Berdasarkan data bulan April 2015 KJK di wilayah ini menunggak sebesar 49% yang artinya separuh dari dana yang digulirkan oleh pemerintah mengalami kemacetan dalam pengguliran dananya. Berdasarkan hasil

evaluasi internal pengurus KJK PEMK Wilayah K, mengungkapkan bahwa besarnya dana yang diberikan untuk menstimulus penerima manfaat dalam meningkatkan kesejahteraannya ternyata belum membuat kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. Untuk itu, artikel ini memberi perhatian bahwa alokasi dana pemerintah yang besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat secara otomatis dapat memberi perbaikan kesejahteraan komunitas yang direfleksikan melalui faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan program kredit mikro bagi komunitas miskin yang dijelaskan melalui konseptual teori mencakup konsep keuangan mikro dan kredit mikro, pemberdayaan masyarakat, dan kualitas hidup komunitas sasaran. Kemudian deskripsi temuan hasil yang kemudian dianalisis dalam bagian pembahasan.

KAJIAN TEORI

Implementasi program penanggulangan kemiskinan di perkotaan memerlukan strategi yang lebih terencana dan komprehensif untuk menysar perubahan perilaku melalui optimalisasi modal yang dimiliki oleh kelompok sasaran. Permasalahan yang ditemui oleh masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan seringkali diartikan sebagai kondisi keterbatasan modal keuangan/finansial yang dimiliki. Namun, pada artikel ini dijelaskan bahwa upaya perubahan kondisi ini, selain perlu intervensi yang menysar pada aspek modal non manusia dan sosialnya seperti modal ekonomi; lingkungan; teknologi; dan fisik juga memerlukan intervensi yang menysar pada perubahan aspek modal manusia dan sosialnya seperti faktor predisposisi; faktor perilaku dan gaya hidup; faktor penguat; dan faktor sosial spiritual kelompok sasaran. Hal ini didasarkan pada konseptual teori kualitas hidup komunitas sasaran (Adi, 2013 & Green, 1991) bahwa kualitas hidup komunitas sasaran saat ini (*existing condition*) yang tidak diharapkan didorong oleh adanya faktor-faktor penyebab masalah dari internal maupun eksternal komunitas sasaran.

Adi (2013) juga menjelaskan bahwa komunitas miskin memiliki keterbatasan dalam kepemilikan sumber daya dari internal seperti keterampilan, pengetahuan, modal finansial, maupun sumberdaya eksternal seperti jejaring dan akses untuk menjangkau pasar (Adi, 2013). Terkait dengan keterbatasan akses Waldfogel, Craigie, & Gunn (2010) bahwa program kesejahteraan sosial didesain untuk mempromosikan jaminan ekonomi melalui upaya perlindungan individu dari risiko yang mungkin menghambat mereka dari sistem pasar. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk mendorong pelaku-pelaku bisnis kecil yang diinisiasi dan digerakkan oleh masyarakat kelompok bawah/miskin melalui *microenterprise* seperti yang diungkapkan oleh Midgley (2014, p.139), dimana *microenterprises* (usaha mikro) merupakan usaha skala kecil yang dikelola oleh masyarakat miskin yang berbeda dari usaha/bisnis lainnya.

Usaha mereka ini dapat didukung oleh organisasi donor, organisasi berbasis keagamaan, organisasi non-pemerintah, perusahaan korporasi, dan lembaga pemerintah yang dapat menyediakan arahan teknis dan pinjaman modal untuk memulai usaha, bahkan seringkali dengan menggunakan skema suku bunga preferensial, pinjaman tersebut disediakan dalam rangka untuk investasi usaha mikro yang seringkali dikenal sebagai ‘kredit mikro’, ‘keuangan mikro’, atau ‘pinjaman mikro’. Upaya ini kemudian akan menjadikan investasi sosial yang memungkinkan terbukanya peluang bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Peluang ini yang diciptakan oleh pihak eksternal dari komunitas sasaran, seperti pemerintah; organisasi non-pemerintah; korporasi.

Lebih lanjut, hasil kajian Sengupta (2013) mendeskripsikan bahwa pengelolaan potensi tersebut perlu dikelola organisasi keuangan mikro sebagai alat untuk mengoneksikan kelompok miskin terhadap perspektif yang lebih positif daripada hanya sekedar fokus pada penganggaran dana yang besar. Sedangkan Hulme & Arrun (2009) berpandangan mengenai praktik penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan, dan banyak praktik kontemporer didasarkan pada konseptualisasi materialis sempit yang tugas pengurangan kemiskinan dilihat sebagai memastikan bahwa rumah tangga memenuhi kebutuhan minimum material atau fisiologis (hal.79) yang selanjutnya perspektif ini juga membawa mereka untuk menangkap akses pemenuhan kebutuhan ini dari sistem eksternal melalui kredit mikro, sehingga posisi individu/komunitas yang sebelumnya berada di bawah garis kemiskinan, maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan mereka dan akan menjadi tidak miskin.

Dari konsep-konsep tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program penanggulangan kemiskinan melalui program kredit mikro, semestinya tidak hanya diukur dari kondisi sedikit atau banyaknya masalah ketidaklancaran dalam pengembalian dana, tetapi juga aspek yang lebih luas lagi dalam pemberdayaan penerima bantuan untuk berperan dalam pembangunan. Hashemi et.al (1996) in Kabeer (2009, p 111), menggambarkan beberapa indikator pemberdayaan:

- (i) Peningkatan kontribusi kelompok perempuan dalam aspek ekonomi;
- (ii) Mobilitas kelompok miskin untuk mulai masuk dalam domain publik;
- (iii) Kemampuan mereka dalam pembelanjaan skala kecil dan besar;
- (iv) Kepemilikan atas asset produktif, termasuk rumah atau pekarangan dan tabungan;
- (v) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan utama, seperti pembelian tanah, atau ternak untuk tujuan mendapatkan penghasilan;
- (vi) Kebebasan dari dominasi keluarga, termasuk kemampuan untuk membuat pilihan mengenai bagaimana uang mereka digunakan, kemampuan untuk mengunjungi

rumah kelahiran mereka saat diinginkan dan pendapat dalam keputusan yang berkaitan dengan penjualan perhiasan atau tanah mereka atau untuk mengambil pekerjaan di luar;

- (vii) Kesadaran politik seperti pengetahuan tentang tokoh-tokoh nasional dan politik dan hukum tentang pewarisan dan partisipasi dalam kegiatan di lingkungan sosial.

Pada umumnya, program yang digagas pemerintah melalui KJK PEMK ini terkait dengan tujuan pemberdayaan masyarakat itu sendiri dengan mendefinisikan suatu masalah atau kualitas hidup komunitas miskin tidak mampu mencapai kesejahteraannya karena keterbatasan modal finansial. Kirst-Ashman & Karen (2010) mengartikan pemberdayaan sebagai peningkatan, penekanan, pengembangan, pemeliharaan kekuatan dan atribut positif. Pemberdayaan dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan individu, kelompok, keluarga dan komunitas dan mengontrol nasib mereka sendiri. Pengertian tersebut sejalan dengan Payne dalam Adi (2013, p. 205-212) menyatakan bahwa inti dari pemberdayaan adalah menolong klien (kelompok yang tidak beruntung) untuk memperoleh kekuatan atau daya untuk menentukan keputusan dan bertindak sesuai dengan pilihannya dengan cara meminimalisasi halangan/hambatan sosial dan personal untuk menggunakan kekuatan yang ada, dengan meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri untuk menggunakan daya dan dengan mentransfer daya dari lingkungan ke klien.

Untuk itu, upaya pemberdayaan masyarakat perlu mempertimbangkan bagaimana kualitas hidup suatu masyarakat tersebut dapat ditingkatkan, bagaimana masyarakat yang miskin karena keterbatasan modal finansial ketika diberikan intervensi akan menjadi berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan melalui kredit mikro yang hanya diupayakan dengan pemberian akses permodalan atau peningkatan modal finansial saja, sudah banyak terbukti melalui beragam penelitian terkait yang sudah menghasilkan kajian atas implementasi program pemerintah. Penelitian yang telah dihasilkan oleh Sugiana (2012) menyebutkan bahwa pada program pengembangan usaha KUBE di salah satu wilayah di Kota Administrasi Jakarta Selatan menemui kendala banyaknya kemacetan usaha yang dijalankan oleh para penerima manfaat karena minimnya proses pendampingan. Proses pendampingan tersebut seharusnya dioptimalkan untuk mengembangkan keterampilan serta meningkatkan mental berwirausaha para penerima manfaat yang belum terbiasa untuk melakukan usaha.

Sedangkan Widayati (2013) yang juga mengkaji tentang program penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah melalui PNPM Mandiri di salah satu Desa di Kabupaten Semarang, membuktikan bahwa program dana bergulir yang diberikan

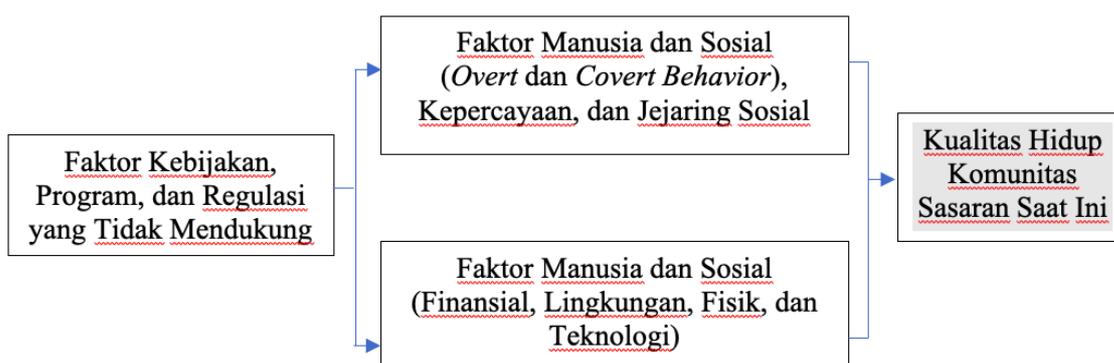
terhadap komunitas miskin belum mampu meningkatkan produktifitas usaha dan perubahan kondisi ekonomi penerima manfaatnya. Hal tersebut terjadi karena selama program dilaksanakan, penerima manfaat tidak diberikan pendampingan usaha untuk mengembangkan keterampilan mereka. Green & Haines (2012) juga mengungkapkan hal yang sejalan yaitu bahwa untuk memberdayakan suatu masyarakat harus dilihat seluruh modal yang dibangunnya dan mencakup modal manusia, modal sosial, modal finansial, modal lingkungan, modal politik, dan modal budaya. Konsep ini membangun perspektif bahwa program pengentasan/pengurangan kemiskinan pada masyarakat miskin seharusnya tidak hanya dilihat pada perspektif satu arah, yaitu masyarakat miskin - kurangnya modal finansial - akses ke sumber daya keuangan - komunitas non miskin, tetapi juga harus memberdayakan semua aspek mereka untuk memberdayakan diri mereka sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan.

Adi (2013) menjelaskan bahwa suatu kualitas hidup komunitas perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang mencakup faktor manusia dan sosial; faktor non-manusia; serta faktor regulasi, kebijakan dan program yang membentuk kondisi/kualitas hidup yang dirasakan tidak menyenangkan tersebut. Begitupun dalam perubahan kualitas hidup yang diharapkan, faktor-faktor yang menjadi penyebab perlu diatasi serta modal-modal yang ada perlu dimaksimalkan. Untuk itu, program kredit mikro sebenarnya memiliki rancangan yang besar terhadap perubahan di masyarakat yang bukan hanya mencakup perubahan kepemilikan modal finansial saja tetapi juga perubahan aspek kualitas hidup masyarakat miskin menjadi lebih baik. Hal tersebut menjadi penting karena komunitas miskin memiliki karakter yang beragam dan kompleks. Pada faktor manusia dan sosial, terdapat empat faktor yang mendorong komunitas memiliki kualitas hidup yang terbentuk sampai saat ini. Faktor pertama yaitu perilaku dan gaya hidup (*behavioral and lifestyle factors*) yang didefinisikan Adi (2013, p.309) sebagai suatu tindakan dari komunitas sasaran yang merupakan cerminan kemampuan dan keterampilan dari individu-individu di dalamnya.

Kemudian, faktor predisposisi yaitu sesuatu yang muncul sebelum (*antecedents*) perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional ataupun rasional terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang (Adi, 2013, p. 310). Sedangkan reinforcing factor dimunculkan atas berkembangnya suatu perilaku dalam bentuk cara pandang sikap dan kebiasaan dari agen perubahan yang terkait dengan komunitas sasaran tersebut. Faktor penguat di sini merupakan aspek perilaku yang terlihat (*overt*) ataupun perilaku yang masih terselubung (*covert*) (Adi, 2013, p. 312) dan Green & Kreuter (1991) mendefinisikan bahwa faktor penguat mencakup imbalan yang diterima, umpan balik yang diterima oleh pihak yang belajar dari pihak lain melalui pengadopsian perilaku, yang dapat mendorong maupun menghambat kelangsungan

perubahan perilaku. Modal sosial yang dimaksudkan adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada di dalamnya, dan mengatur pola perilaku warganya, juga unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) sosial antar warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat (Adi, 2013, p.313).

Selain mengidentifikasi faktor manusia dan modal sosial, diperlukan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain seperti faktor program dan regulasi. Adi mendefinisikan yang dimaksud program dan regulasi ini diasumsikan benar-benar terkait ataupun berpengaruh menyebabkan terjadinya kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan saat ini (Adi, 2013, p. 318). Untuk itu, kerangka konseptual yang menjadi dasar pembahasan artikel ini didasarkan pada model kualitas hidup komunitas sasaran saat ini untuk merefleksikan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan program KJK PEMK (X) dalam menanggulangi kemiskinan kelompok sasaran. Kerangka konseptual dijelaskan sebagai berikut:



Skema 1.1. Kerangka Konseptual

Sumber: Olahan dari Adi (2013) & Green (1991)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program kredit mikro yang dijalankan sebagai program inisiasi pemerintah provinsi yaitu KJK – PEMK. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rubin & Babbie (2008) pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam untuk menghasilkan makna yang mendalam terhadap pengalaman fakta dari perilaku manusia.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana diupayakan penelitian mampu mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu

fenomena dan kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan atau menggantikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 2003, hal. 20). Untuk itu pada penelitian ini berusaha untuk menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan temuan-temuan atas faktor-faktor penghambat pelaksanaan program KJK-PEMK kemudian dieksplorasi dan diturunkan untuk memetakan indikator-indikator yang mampu menjelaskan lebih terperinci dari temuan yang menarik tersebut.

Dalam proses pengumpulan data primer, penelitian ini melibatkan 3 pihak informan dengan cara *purposive sampling* untuk menggali informasi yang relevan harus menyasar pada kriteria informan yang sudah ditetapkan dalam rancangan penelitian Babbie (2010, p. 193) bahwa *purposive sampling* digunakan ketika peneliti menentukan informan berdasarkan basis pengetahuan suatu populasi, elemen-elemen di dalamnya, serta tujuan penelitiannya. yang mencakup Ketua Pengurus KJK-PEMK, Manajemen Keuangan dan Program, Staf Penagihan (*Collector*) di Lapangan, serta representatif dari penerima manfaat. Penelitian ini dirasa mengangkat isu yang sensitif bagi informan karena ketidakberhasilan program di komunitas (X).

PEMBAHASAN

Sebagian besar wilayah yaitu sekitar 60% area penerima program KJK-PEMK dinilai tidak berhasil dilihat dari persentase pengembalian dana yang tidak lancar. KJK-PEMK (X) ini sampai dengan tahun 2015 terhitung telah memperoleh pencairan dana sebesar Rp.1.740.000.000,00 namun jumlah pengembalian dana hanya sebesar Rp.880.691.000,00. Hal ini berarti KJK-PEMK tercatat memiliki jumlah tunggakan sebesar Rp.859.309.000,00 (kurang lebih 50% dari total dana yang dicairkan oleh APBD).

Dari hasil pemetaan faktor-faktor penghambat pelaksanaan program sebagai refleksi ketidakberhasilan program pemberdayaan ekonomi bagi komunitas miskin perkotaan melalui kredit mikro disebabkan karena adanya faktor-faktor penyebab yang mencakup faktor manusia dan sosial; faktor non manusia dan sosial; serta faktor regulasi, kebijakan dan program yang terkait KJK PEMK (X).

Faktor Manusia dan Sosial

Terkait dengan faktor manusia dan sosial, dari hasil pengumpulan data diperoleh kondisi bahwa yang menjadi kendala dalam implementasi program KJK PEMK ini mencakup *predisposing factors, behavior and lifestyle factors, social and spiritual factors, and reinforcing factors*.

(i) Faktor Predisposisi (*Predisposing Factors*)

Beberapa faktor yang ditemui dari anggota KJK. Faktor tersebut antara lain, adanya nilai yang ditanamkan oleh penerima manfaat bahwa dana pinjaman sebagai dana pemerintah yang tidak prioritas untuk dikembalikan dan pemanfaat tidak memiliki pengetahuan untuk menjalankan usaha sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang informan:

“Juga bagaimana *mindset* masyarakat itu. Mereka *kan* menganggap ini dana DKI, dana pemerintah. Kalau ditagih mereka bilang *duit* dari pemerintah ini. Apalagi yang di atas begitu korupsinya, kita masyarakat kecil buat bakal makan aja susah masa mau disusahin lagi. Begitu akhirnya.” (Amr, Pengurus, 18 Juni 2015)

Pengetahuan juga merupakan bagian penting dalam modal predisposisi untuk menunjang keberhasilan usaha. Permasalahannya, anggota KJK yang menunggak tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menjalankan usaha. Informan mengatakan,

“Biasanya mereka *kan* sebagian awalnya nggak punya usaha. Ya yang punya usaha juga banyak sih. Tapi ada yang emang belum mulai. Terus waktu dengar ada program dana ini mereka pada mengajukan mau usaha. Ya bagus sih istilahnya jadi termotivasi gitu ya buat berkembang. Tapi ya gitu *mbak*, asal nyemplung aja. *Nggak* tahu bagaimana caranya jualan, (Han, Pengurus, 2 September 2015)

(ii) Faktor Perilaku dan Gaya Hidup (*Behavior and Lifestyle Factors*)

Dari *predisposing factors* yang ada pada penerima manfaat, pada akhirnya juga membentuk faktor perilaku dan gaya hidup yang tidak menguntungkan. Salah satu faktor yang muncul adalah mereka belum mampu membiasakan diri untuk melakukan konsistensi dalam menjalankan usaha. Sebagai akibatnya, mereka tidak dapat melakukan pembayaran cicilan dana pinjaman. Hal ini disampaikan oleh informan,

“Saya suka jalan nagih *kan*, suka lihat liat itu orang kemarin perasaan jualan es begitu kok sekarang udah *nggak* lagi. Yah begitu *mbak*.. terus saya suka tanya kenapa *nggak* jualan lagi bu? Ya paling jawabnya lagi males pak, anaknya lagi *rese*. Ada lagi jawabnya belum beli bahan.. yah kalau niatnya masih separoh *mah nggak nyampe-nyampe*” (Han, Pengurus, 2 September 2015)

Selain itu juga keterampilan yang dimiliki oleh penerima manfaat untuk melakukan usaha belum memadai, sehingga menjadi penghambat bagi mereka untuk dapat terus menjalankan usaha dengan lebih berkesinambungan. Seperti yang dinyatakan oleh informan sebagai berikut,

“kalau usaha apa gitu kan kita mesti tahu caranya ya. Cara bikin bakso gimana, cara bikin cilok, ya kan semuanya mesti dipelajarin. Mangkanya kalau asal nyemplung saja usaha dicoba-coba ternyata *nggak jalan* ya sudah duitnya *nggak* bisa berputar lagi. Jualannya *nggak laku*.” (Han, Pengurus, 2 September 2015)

(iii) Faktor Penguat (*Reinforcing Factors*)

Faktor penguat yang membuat program kredit mikro melalui KJK PEMK ini adalah termasuk faktor yang dimunculkan oleh pengelola program. Dari hasil pengumpulan data diketahui bahwa pengelola kurang menjalankan fungsinya dengan baik. Alhasil, beberapa tugas yang menjadi permasalahan krusial tidak berjalan. Misalnya petugas tidak datang melakukan penagihan secara rutin. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan, “Emang *nggak* ada jadwal pasti saya kelilingnya. Ya namanya kita punya kerjaan lain ya.” (Han, Pengurus, 21 September 2015).

Namun permasalahannya, hal-hal mendasar terkait dengan penagihan pun terdapat banyak hambatan sehingga mereka juga tidak sampai pada fungsinya untuk melakukan pembinaan. Hal ini juga ditunjukkan dengan fakta bahwa mekanisme penagihan “jemput bola” saja belum efektif dilakukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan:

“Susah kayak *diping-pong* mbak. Dulu ada kantor, mereka disuruh tiap bulan ke sana setor juga paling yang nyetor berapa orang. Orangnya itu-itu saja yang rajin (nyetor). Mangkanya saya sama Bu Mil (kasir) yang jadi nambah kerjaan *nyamperin* satu per satu anggota yang minjem. Itu saja *nggak gampang*. Dijanjiin besok, didatangi besok, ada saja alesannya kalau *nggak* ditutup pintunya” (Han, Pengurus, 21 September 2015).

Dari ungkapan di atas dapat dikemukakan bahwa hal tersebut menyebabkan pengembalian dana ke UPDB terkendala. Anggota diminta menyetorkan angsuran ke kantor KJK, tetapi mereka tidak datang. Sedangkan jika pengelola program mendatangi penerima manfaat maka mereka juga tidak menunjukkan kerjasamanya dengan selalu memberikan janji untuk membayar angsuran. Bahkan tidak jarang saat petugas KJK datang, mereka menutup pintu rumahnya.

(iv) Faktor Sosial dan Spiritual (*Spiritual and Social Factors*)

Faktor spiritual dan sosial yang menghambat pengembalian pinjaman juga ditemukan. Faktor-faktornya antara lain pengaruh lingkungan yang dimunculkan anggota lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh informan, “kalau di sini mereka melihat tetangganya yang minjam itu bayar *nggak*, kalau *nggak* bayar ya bakal ikutan juga. Kompaknya begitu”

(Han, Pengurus, 21 September 2015). Hal tersebut juga diperkuat dengan informasi yang disampaikan oleh penerima manfaat mereka mengakui bahwa pola tersebut dilakukan karena adanya solidaritas sesama anggota, serta lemahnya sanksi yang diberikan KJK PEMK sehingga mereka menilai jika tidak mengembalikan dana pinjaman juga tidak akan menjadi masalah, seperti yang dinyatakan oleh salah satu penerima manfaat sebagai berikut “ya kalau saya mau bayar nih ya, terus si Bu A bilang ‘wah bulan depanan aja yuk Bu.. si bu itu juga *nggak* bayar *nggak* diapa-apain.” (N, Penerima Manfaat, 20 September 2015).

Selain itu, lemahnya faktor spiritual yang terkait sebagai salah satu faktor penyebab program tidak efektif juga terlihat ketika sebagian penerima manfaat menganggap jika dana pinjaman yang diberikan oleh pemerintah melalui program kredit mikro ini bukan merupakan hutang yang wajib untuk dibayarkan, karena lebih baik mereka membayar di akhirat daripada membayar di dunia.

Non-Social and Human Factors

Terkait dengan non-human and social factors, dari hasil pengumpulan data diperoleh kondisi bahwa yang menjadi kendala dalam implementasi program KJK PEMK ini mencakup *economic/financial factors* dan *environmental factors*.

(i) *Economic/Financial Factors*

Permasalahan yang terkait dengan faktor ekonomi/finansial dimunculkan dari penerima manfaat maupun pengelola program. Pada penerima manfaat, salah seorang informan mengatakan bahwa anggota KJK yang menunggak lebih memprioritaskan kebutuhan rumah tangga dibandingkan dengan pengembalian dana pinjaman. Ia berkata, “ditagih ya pada jawabnya udah habis buat beli makan, sekolah anak. udah *nggak* ada lagi buat *ngangsur*” (Han, Pengurus, 21 September 2015).

Selain itu, faktor jenis usaha juga menjadi bagian penyebab penunggakan pengembalian dana KJK. Informan mengatakan, “biasanya pedagang kecil yang jualan minuman buat anak-anak. Ada juga yang dagang keliling. Itu biasanya yang susah muterin uangnya, untungnya *kan* *nggak* seberapa. Buat kebutuhan sehari-hari saja sudah habis...” (Amr, Ketua, 18 Juni 2015).

Sedangkan pada faktor yang dimunculkan oleh pengelola program, ditemukan informasi bahwa alokasi anggaran KJK PEMK banyak digunakan untuk menyewa kantor dan juga membayar honor pengelola program. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan, “Itu biaya sewa kantor disana dulu 600 (ribu) sebulan akhirnya sekarang *nggak* *ngontrak* lagi... Ya sekarang di sini saja. Orang pengurusnya juga pada bubar, mau ngapain lagi *ngontrak* kantor”

(Amr, Ketua, 18 Juni 2015). Sedangkan kondisi lain juga membuat beban KJK PEMK yang besar untuk membayar tuntutan honorarium tanpa melihat bagaimana pengelolaan KJK untuk keberhasilan program, sehingga biaya operasional KJK yang tinggi tidak berimbang dengan proses pekerjaannya. Pada akhirnya, KJK menjadi bermasalah dan tidak beroperasi lagi.

(ii) ***Environmental Factors***

Ada pula faktor eksternal dari anggota yang tidak bisa dihindari seperti bencana alam (banjir). Mengenai hal ini, salah seorang informan mengatakan, “ya memang rata-rata karena banjir, kebakaran ya usaha mereka ada yang masih bisa jalan cuman nggak kayak semula. Kalau umpamanya mereka biasanya dagang bisa macem-macem, mereka cuman dagang sekedar aja untuk nyambung hidup. Kalau istrinya yang dagang biasanya lakinya kerja. Kerjanya rata-rata tukang panggul di pasar mester ada juga yang bantu-bantu parkir. Kalau pelayan toko aja paling Cuma 50 ribu per hari belum buat makan, terus belum buat anak ya habis sudah. Apalagi kena banjir..” (Amr, Ketua, 18 Juni 2015).

Selain faktor alam, unsur eksternal dari anggota juga bisa datang dari peristiwa tak terduga lainnya seperti penggusuran. Informan mengatakan, “Apalagi abis gusuran mbak. Anggota kita kebanyakan dari kp pulo. Situasinya lagi panas kita juga nggak bisa nagih kan. Mereka lagi kena banyak provokasi, yang biasa jualan di rumah juga stop usahanya. Jadi serba salah kita mau lanjutin nagih kan..” (Han, Pengurus, 21 September 2015)

Program, Policy and Regulation Factors

(i) ***Permasalahan pada Penerapan Proses Pra-Peluncuran Dana***

Proses pra peluncuran dana KJK juga memiliki permasalahan. Salah satunya adalah proses seleksi yang tidak tepat sasaran. Salah satu informan mengatakan,

“Saya bantuin Pak Amr buat survey ke calon nasabah. Ya dilihat memang harusnya dia miskin, punya usaha. Hanya memang ada kebijaksanaan buat nolong warga yang butuh pinjaman. Kita *sodorin* brosur, yang kayak brosur kredit motor itu mbak *list* angsuran.

Terus dia ok mau ngangsur ya udah kita *acc*.” (Han, Pengurus, 2 September 2015)

Dalam proses pra peluncuran ini pun tidak ditemukan adanya data bahwa KJK memiliki Standar Prosedur Operasional yang bisa meminimalisir permasalahan. Akibat sasaran yang tidak tepat dan tidak adanya SOP yang jelas, pemanfaat pun mempergunakan pinjaman bukan untuk pengembangan usaha kecil menengah. Hal ini dikemukakan oleh informan,

“Ya memang seharusnya syaratnya warga sini, punya KTP sama KK sini, punya usaha kecil, miskin. Tapi ada yang ke sini nangis minta pinjaman buat sekolah anaknya, buat

makan ya kalau ada uang (dari hasil penagihan) ya masa saya nggak kasih mbak. Ya namanya perasaan ya, pengen nolong warga... Ya memang sih yang gitu-gitu yang suka bikin macet karena memang uang pinjamannya bukan buat usaha jadi nggak muter tapi buat keperluan yang pasti habis” (Amr, K, 18 Juni 2015).

(ii) *Permasalahan pada Pengelolaan Dana*

Data mengenai proses evaluasi juga tidak ditemukan. Sebagai hasilnya, roda organisasi berjalan begitu saja tanpa ada rambu-rambu yang jelas. Bahkan dana hasil pengembalian pun digulirkan tanpa prosedur yang jelas. Informan mengatakan, “Itu mbak, kalau hasil setoran anggota ya biar sedikit kalau ada yang perlu ya kita pinjemin lagi ke anggota yang lain.” (Han, Pengurus, 21 September 2015). Selain itu, ada pulan informan yang mengatakan, “Kalau penagihan, kalau mereka sadar mereka datang. Sedikit-sedikit dari hasil tagihan orang-orang yang masih inget ya saya kumpulkan untuk memberikan bantuan, kadang-kadang kasian banget gitu kan di masyarakat kita minta tolong 200-300 ribu. Jadi hasil tagihan itu ya *digulirin* lagi. Jadi *nggak* kesetor-setor ke UPDBnya.” (Amr, Ketua, 18 Juni 2015)

(iii) *Tidak Adanya Upaya Pembinaan Usaha Penerima Manfaat*

Program KJK PEMK yang menysasar pada komunitas miskin hanya berfokus pada pemberian dana melalui kredit mikro tetapi tidak mengupayakan perbaikan pada aspek yang lain melalui pembinaan penerima manfaat. Hal ini mengakibatkan penerima manfaat yang sebelumnya belum pernah memiliki keterampilan dan tekad yang besar dalam menjalankan usaha pada akhirnya sulit untuk terus mempertahankan usahanya. Salah seorang informan menjelaskan,

“*Nggak* ada sih mbak. *Nggak* ada programnya (pembinaan). Setelah mereka dapat dana ya mereka jalan sendiri aja. Yang penting buat kita keberhasilan programnya ya dilihat dari kelancaran bayar setorannya. Emang ya itu yang saya bilang, orang niatnya masih separoh terus nyemplung aja coba-coba usaha. *Nggak* belajar dulu, kitanya juga *nggak* ada program pembinaan” (Han, Pengurus, 21 September 2015).

Selain itu, komunitas yang menjadi penerima manfaat juga tidak memperoleh program-program lain baik dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang mendukung peningkatan kompetensi mereka dalam melakukan *microenterprise*. Namun, program-program yang selama ini diperoleh mereka hanya mencakup program-program bantuan sosial saja ketika ada musibah atau saat masa kampanye pemilihan umum. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh salah seorang penerima manfaat, “*nggak* ada (program), selama saya di sini udah 20

tahunan ya cuma sekali dapet ini modal buat usaha nanti disuruh balikannya nyicil. Pelatihan *nggak* ada. Paling ya kalau lagi banjir atau lagi musim pemilu pada ngasih bantuan.” (Ir, Penerima manfaat 18 September 2015).

Studi ini menekankan pada kebijakan dan program sosial untuk menanggulangi kemiskinan, ternyata memiliki urgensi permasalahan terkait belum efektifnya program tersebut dalam mencapai tujuannya, dengan mengacu pada indikator kelancaran dana bergulir. Alokasi dana yang besar nyatayanya belum mampu meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat yang dibuktikan adanya kendala pengembalian dana yang cukup besar. Program kredit mikro seperti yang dinyatakan oleh Matin & Hulme (2009) sebenarnya menjadi harapan untuk individu/komunitas yang selama ini berada pada tingkat pemenuhan kebutuhan dasar yang rendah atau di bawah garis kemiskinan sehingga ketika mereka diberikan ‘intervensi’ melalui akses pemberian modal untuk membuka kesempatan masuk ke dalam pasar ekonomi dengan menjadi pelaku *microenterprise*, maka lama kelamaan diharapkan akan terjadi perubahan kondisi kesejahteraannya.

Program kredit mikro yang dikembangkan merupakan sebuah upaya yang besar dari pemerintah dengan alokasi dana yang besar untuk menysasar komunitas miskin perkotaan dirancang untuk memberi peluang bagi mereka dapat terlibat dan berperan di pasar. Peran masyarakat miskin yang menjadi penerima manfaat program PEMK ini diharapkan dapat melaksanakan *microenterprise*, yang sejalan dengan pemikiran Midgley (2014) bahwa *microenterprise* merupakan usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat miskin dengan adanya dukungan-dukungan dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah sehingga nantinya dapat berperan secara aktif dalam pembangunan. Namun dalam konteks ini perlu dilihat lebih jauh bahwa ketika suatu permasalahan yang sangat mendasar yaitu adanya ketidakmampuan (*inability*) dalam pemenuhan kebutuhan dasar karena kurangnya sumber daya dan keterbatasan akses atau peluang dalam pasar juga perlu dipertimbangkan aspek yang lainnya yang terkait bukan hanya ‘modal finansial’nya saja melalui pemberian program kredit mikro.

Akan tetapi, keberhasilan suatu program kredit mikro yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin perlu ditunjang pada upaya pemberdayaan yang menyeluruh pada komunitas seperti yang diungkapkan oleh Green & Haines (2012) & Adi (2013) dimana kualitas hidup suatu komunitas perlu dilihat cakupan pada peningkatan modal manusia (*human capital*), modal social (*social capital*), modal finansial (*financial capital*), modal lingkungan (*environmental capital*), modal politis (*political capital*), dan modal kultur (*cultural capital*). Begitu juga dengan usaha dalam memberdayakan komunitas untuk mencapai perbaikan

kualitas hidup (meningkatnya kesejahteraan) perlu melakukan perubahan pada aspek-aspek tersebut.

Kondisi kualitas hidup komunitas di wilayah (X) sebelum diberikan intervensi (program mikro kredit melalui KJK PEMK) adalah kondisi belum sejahtera karena terbatasnya kemampuan komunitas tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga ketika ditarik ke awal untuk melihat faktor-faktor yang membentuk kualitas hidup tersebut adalah mencakup faktor manusia dan sosial (*human and social factors*), faktor non-manusia dan sosial (*non-human and social factors*), dan faktor program dan kebijakan terkait (*regulation, policy, and program policy factors*). Permasalahan ketidakberhasilan program kredit mikro KJK PEMK ini dapat dikaitkan dengan alur kualitas hidup komunitas, maka ketika pemerintah mengupayakan program kredit mikro bagi komunitas tersebut nyatanya hanya memberikan perubahan pada aspek faktor finansial/ekonomi (*economic/financial factors*) yaitu meningkatkan akses permodalan.

Namun peluang modal tersebut tidak mampu dikelola secara optimal dalam prosesnya yaitu dengan tidak dibarengi dengan upaya perubahan dalam faktor manusia dan sosialnya yang mencakup faktor predisposisi, faktor perilaku dan gaya hidup, faktor penguat, dan faktor sosialnya. Selain itu, ketidakberhasilan program ini juga disebabkan karena adanya inkonsistensi penerapan aturan pada kebijakan dan program yang diupayakan pelaksana program. Selain itu, pada implementasi program ini juga terlihat bahwa kondisi faktor lingkungan (*environmental factors*) yang belum teratasi yaitu permasalahan banjir dan pengrusakan serta faktor regulasi dan program yang ada di komunitas sasaran program justru menjadi penghambat dalam keberhasilan implementasi program untuk memperbaiki kualitas hidup komunitas miskin menjadi lebih sejahtera.

KESIMPULAN

Artikel ini mengemukakan bahwa peningkatan kesejahteraan pada komunitas miskin tidak hanya perlu untuk menfokuskan pada peningkatan aspek finansial/ekonomi saja tetapi juga perbaikan aspek-aspek lain yang lebih menysasar pada manusia dan sosialnya. Untuk itu, implementasi program kredit mikro perlu disinergikan dengan program pengembangan sosial yang lain dalam tujuan untuk mengubah aspek modal manusia dan sosialnya yang mencakup perubahan nilai, pengetahuan, keyakinan, dan pandangan komunitas (*predisposing factors*), mengubah kebiasaan dan perilaku komunitas (*behavior and life style factors*), mengubah kepercayaan (*trust*) dan jaringan sosial (*social network*) di lingkup internal maupun eksternal komunitas (*social and spiritual factors*), serta mengubah faktor-faktor penguat seperti

kapabilitas petugas KJK PEMK, tokoh masyarakat, dan sebagainya yang menjadi pihak terkait dalam komunitas. Selain itu, juga perlu adanya perubahan yang mendasar pada konsistensi implementasi program dan kebijakan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun komunitas pendukung yang kemudian dapat berjalan sinergis untuk lebih memberdayakan komunitas miskin sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan yang lebih konstan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas manusia dan sosialnya, mencakup peningkatan kesadaran atas masalah dan potensi diri, peningkatan keterampilan mengelola keuangan dan usaha mikro, peningkatan komunikasi, serta didukung dengan adanya penguatan aturan dan kebijakan yang terimplementasi secara konsisten dari agen pemerintah sampai agen pelaksana di tingkat lokal. Artikel ini masih perlu dikembangkan dalam kaitan peran pelaksana di level komunitas untuk bisa mendukung perubahan pada aspek-aspek yang memungkinkan menstimulus perubahan kualitas hidup komunitas sasaran, terutama pada modal manusia dan sosialnya. Selain itu, perlu juga dikembangkan kajian mengenai formulasi kebijakan yang didasarkan dari karakteristik komunitas sasaran yang memiliki masalah dan potensi yang bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2013). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi 2012. Jakarta: Rajawali.
- Babbie, E. (2010). *The Practice of Social Research*. 13th edition. Australia: Wadsworth Cengage Learning.
- Brook, R. M., Hillyer, K. J., & Bhuvaneshwari, G. (2008). Microfinance for community development, poverty alleviation and natural resource management in peri-urban Hubli-Dharwad, India. *Environment and Urbanization*, 20 (1), 149–163. <https://doi.org/10.1177/0956247808089153>
- Bryman, Alan. (2008). *Social Research Method*. New York: Oxford University Press.
- Green, L. W., Kreuter, M.W. (1991). *Health Promotion Planning: An Educational and Environmental Approach*. USA: Mayfield Publishing Company.
- Green, G.P., & Haines, A. (2012). *Asset Building and Community Development*. 3rd ed. London: SAGE Publication, Inc.
- Faisal, Sanaipah. (2003). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hulme, D. Arrun, T. (2009). *Microfinance: A Reader*. London: Routledge.
- Kabeer, N (2009). *Women's economic empowerment: key issues and policy options*. Sida Policy (SIDA51910en). Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), Stockholm.
- Kirst-Ashman, K. K.. (2010). *Introduction to social work and social welfare*. Australia: Brooks/Cole.
- Midgley, J. (2014). *Social Development: Theory and Practice*. London: Sage Publication.
- Rubin, Allen & Babbie, Earl R. (2008). *Research Methods for Social Work*. 6th Ed. USA: Thomson Brooks/Cole.
- Sakethi. (2010). *PPMK: Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: PT Mirah Sakethi. ww.beritajakarta.com/download/ppmk_ver_ind.pdf (Diakses pada 29 Desember 2017)
- Sengupta, N. (2013). Poor Women's Empowerment: The Discursive Space of Microfinance. *Indian Journal of Gender Studies*, 20 (2), 279–304. <https://doi.org/10.1177/0971521513482220>

- Sugiana (2012). *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Jakarta Selatan*. Tesis. Universitas Indonesia.
- UPDB DKI Jakarta (April, 2015). *Laporan Dana Bergulir DKI Jakarta*. Tidak dipublikasikan.
- Waldfogel, J. Craigie., T., Gunn, J.B. (2010). *Fragile Families and Child Wellbeing*. *Future Child*, 2010 Fall; 20(2): 87–112. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3074431/> (Diakses pada 15 Februari 2019)
- Widayati, S. (2013). *Pemberdayaan Ekonomi Melalui Dana Bergulir PNPM Mandiri bagi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Sraten Kabupaten Semarang*. *Jurnal Ilmiah Inkoma*, Vol. 24, No. 1 (2013). <http://jurnal.undaris.ac.id/index.php/jurnal/article/view/20> (Diakses pada 12 Januari 2019)
- Wulan, Y.C., Ati, N.U., & Widodo, R.P. (2019). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Probolinggo, Jawa Timur. *Jurnal Respon Publik*, 13 (4), 104-109. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3596/3233>
- Zuber, A. (2014). Kemiskinan dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3 (1), 70-90. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/viewFile/17450/13938>